

Terorisme Sebagai Konstruksi Politik (Titik Balik Benturan Antar Peradaban)

Fathurrahman Yahya

*Alumnus Sekolah Pascasarjana, Peradaban Islam, Universite Ezzitouna, Tunisia; Porogram
Doktoral Komunikasi Politik dan Diplomasi Universitas Sahid, Jakarta
Email : fathi_id@yahoo.com*

Abstract

The September 11, 2001, attacks on the World Trade Center in New York and the Pentagon in Washington, DC, United States, are considered the most devastating terrorist acts of the early 21st century. Thousands of lives were lost, highlighting terrorism as the most dangerous threat of this century. The international community was shocked that a superpower like the United States could be targeted by terrorists. President George W. Bush promptly declared a war on terrorism, identifying it as the most pressing national security threat. He launched a global diplomatic campaign to combat terrorism. Since then, terrorism has been a major issue and a topic of debate, raising questions about its definition as a criminal act. This paper aims to explain the definition of terrorism, which often carries political and ideological biases that harm specific communities, particularly the Muslim community. The sporadic and tendentious interpretation of terrorism is often linked to theological aspects, suggesting that acts of terror (i.e., terrorism) are part of Islamic teachings through the lens of jihad. By reviewing relevant academic sources, this paper finds that the definition of terrorism is not singular and is often biased. Given the lack of consensus, Jurgen Habermas's perspective on communication and dialogue is important for bridging gaps between religions and civilizations. Additionally, Jacques Derrida's approach requires a deconstruction of the language surrounding previous understandings to comprehend terrorism fully..

Keywords: terrorism, ideology, conflict, resolution

Abstrak

Serangan 9 September 2001 yang menimpa World Trade Centre di New York serta Gedung Pentagon di Washington DC, Amerika Serikat dianggap sebagai serangan teror paling dahsyat awal abad ke 21 M. Ribuan nyawa hilang akibat serangan tersebut, sehingga menyadarkan masyarakat dunia bahwa terorisme merupakan ancaman paling berbahaya abad ini. Seolah masyarakat internasional tidak percaya bahwa negara adidaya seperti Amerika Serikat bisa menjadi korban yang ditarget para teroris. Seketika, Presiden George W. Bush menyatakan perang terhadap terorisme karena dianggap sebagai ancaman paling mendesak bagi keamanan nasional negeri Paman Sam ini. Ia berkampanye secara global melalui jalur diplomasi untuk memerangi terorisme. Akhirnya, sejak itu terorisme menjadi persoalan dan isu besar dan masih diperdebatkan, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana terorisme didefinisikan sebagai tindak kejahatan? Paper ini bertujuan untuk menjelaskan definisi terorisme yang sejauh ini kerap memiliki bias politik dan ideologis yang tentu merugikan komunitas tertentu, khususnya komunitas muslim. Terorisme dengan pemaknaan yang sporadis dan tendensius, dianggap berkorelasi dengan aspek teologi bahwa tindakan teror (baca:terorisme) adalah bagian dari ajaran Islam dilihat dari perspektif jihad. Paperr ini dengan menelaah sumber-sumber akademik terkait melalui studi pustaka, menemukan bahwa definisi terorisme tidak tunggal, bahkan yang terjadi adalah bias. Oleh karena tidak ada titik

temu, maka perspektif Jürgen Habermas tentang komunikasi dan dialog menjadi penting sebagai jembatan untuk menyatukan antar agama dan peradaban. Sementara itu untuk memahami terorisme bagi Jacques Derrida perlu dekonstruksi-bahasa terhadap berbagai pemahaman sebelumnya.

Kata kunci : terorisme, ideologi, konflik, resolusi

Pendahuluan

Masyarakat internasional setelah terjadi serangan teror pada 11 September 2001, yang meruntuhkan menara kembar (World Trade Center) di New York dan Pentagon, sebagai simbol pertahanan Amerika Serikat, terperangah dan mulai menyadari adanya eksistensi tindakan teror

atau yang kemudian disebut terorisme sebagai suatu paham.

Peristiwa tersebut kemudian melahirkan spekulasi yang bersumber dari asumsi-asumsi politis bahwa tindakan teror (baca:terorisme) itu muncul sejak 11 September 2001, dan *mastermindnya* adalah Osama Bin Laden, pemimpin jaringan Al-Qaeda, ¹ seorang fundamentalis dan ekstrimis muslim ². Spekulasi tersebut semakin liar sebagai penguatan terhadap tesis benturan antar peradaban sebagaimana dicetuskan Samuel P. Huntington dalam *"The Clash of Civilizations"* (1993).³

Tesis Huntington tentang benturan antar peradaban tampak sebagai kajian futuristik, sekaligus strategis dengan segala dimensinya, politis maupun ideologis, sehingga melapangkan jalan bagi Amerika Serikat khususnya untuk mencari dan menemukan musuh-musuh barunya (*new enemies*) setelah

berakhirnya perang dingin. Kemudian, melancarkan perang terhadap kelompok anti demokrasi, menghancurkan pemerintahan diktator dan otoritarian seperti : pemerintahan Taliban di Afganistan, dan pemerintahan Saddam Husein di Irak 2003.

Pasca peristiwa tersebut, Presiden George W.Bush secara serius melakukan diplomasi global bertekad untuk mencari dan menghentikan aksi-aksi terorisme di seluruh dunia. Perang di Afghanistan dan Irak adalah bagian dari Perang Global Melawan Teror (*Global War on Terror*) atau disingkat GWOT. Dunia pun bereaksi dan berkoalisi menjadi mitra Amerika Serikat melawan teroris.⁴

“ Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated”. (*President George W. Bush, September 20, 2001*).

Berbagai pandangan dan opini tampak semakin serius membahas tentang terorisme dan diperbincangkan banyak filsuf, cencekiawan, akademisi, politisi, dll, sehingga bagi masyarakat pada umumnya, terorisme seolah menjadi sebuah fenomena baru yang mencuat ke permukaan dengan berbagai implikasinya; sosiologis, politis, dan teologis. Artinya, terorisme dikonstruksi secara politis

¹. Pada tanggal 20 September 2001, Presiden AS, George W. Bush menyampaikan pidato dalam Sidang Gabungan Kongres. Bush menggunakan pidatonya untuk mengidentifikasi Al Qaeda dan kolaboratornya sebagai pelaku serangan. Ia juga menegaskan bahwa Al Qaeda adalah musuh tidak hanya bagi Amerika Serikat tetapi juga bagi dunia yang bebas. Perang melawan Al Qaeda, menurut Bush, bukan hanya perang Amerika saja: "Ini adalah perjuangan dunia. Ini adalah perjuangan peradaban." (lihat: George W. Bush on the 9/11 attacks, 2001 | Gilder Lehrman Institute of American History, January 19, 1992.

². Dalam tajuk opini The Washington Post, berjudul "Wishful Thinking About Islamic Fundamentalism, edisi, 19 Januari 1992, Amos Perlmutter menggambarkan Fundamentalisme Islam sebagai gerakan revolusioner yang agresif dan militan serta

penuh kekerasan seperti gerakan Bolshevik, Fasis, dan Nazi di masa lalu. Menurutnya, Gerakan-gerakan di Yordania, Pakistan, Aljazair, dan Mesir telah berhasil menipu para ahli dengan meyakini bahwa begitu mereka berkuasa, mereka akan menjadi reformis, bertahap, dan pada akhirnya akan memerintah berdasarkan hukum.

³. Clash of Civilizations merupakan tesis Samuel Huntington bahwa identitas budaya dan agama masyarakat akan menjadi sumber utama konflik di dunia pasca-Perang Dingin (cold war). Menurut Huntington perang di masa depan tidak akan terjadi antar negara, tetapi justru akan terjadi antar budaya. Tesis ini kemudian dipublikasikan dalam bentuk artikel di Foreign Affairs tahun 1993 yang berjudul "The Clash of Civilizations?"

⁴. <https://www.georgewbushlibrary.gov/research/topic-guides/global-war-terror>

sebagai eksekusi dari konflik ideologis; demokrasi vs otoritarianisme, konflik teologis; fundamentalis vs sekuler, konflik ideologi ekonomi; kapitalisme vs sosialisme-komunisme, dll.

Apa dampak dan implikasi pemahaman yang “keliru” tentang terminologi terorisme? Apakah terorisme muncul sebagai fenomena baru sejak September 2001 yang sarat dengan asumsi-asumsi politis? Apakah terorisme - berkorelasi dengan ideologi politik atau teologi agama tertentu? Sejauh mana usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari konflik yang bisa berkepanjangan ini?

Kajian ini mencoba mengeksplorasi, mengidentifikasi serta menjelaskan tentang terorisme dan kompleksitas pemaknaannya sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas sekaligus menawarkan formula resolusi untuk menyambung sisi peradaban antar bangsa, sehingga masyarakat global bisa menyatu dan hidup berdampingan secara damai melalui komunikasi dan dialog.

Perspektif Komunikasi Jürgen Habermas dalam merekonstruksi hubungan antar peradaban umat manusia serta konsep dekonstruksi – Jacques Derrida dalam membentuk imunitas kekuatan negara-bangsa menjadi jawaban atas pertanyaan pelik tentang terorisme.

Kajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terorisme sebagai wacana politik, ideologi, dan teologi yang terus diperdebatkan.

Pembahasan

2.1 Kompleksitas Makna Terorisme

Terorisme sejak peristiwa 11 September 2001, menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum dalam skala besar di Amerika Serikat, karena ancaman terorisme hingga terbentuk

kembali peradilan pidana di Amerika Serikat. Maka, muncul perdebatan-perdebatan hukum tentang definisi terorisme dalam konteks peradilan kriminal (*criminal of justice*)⁵.

De Valve, Michael J. dalam (Terrorism, 2023) memandang bahwa, pemahaman terorisme sulit untuk didefinisikan karena beberapa alasan, salah satunya masalah perspektif: Seorang teroris mungkin dianggap sebagai pejuang kemerdekaan dan kebebasan bagi orang lain. Mungkin juga banyak orang di Timur Tengah menganggap para agen al-Qaeda yang (dituduh) melakukan serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat sebagai pahlawan. Sebaliknya, Sons of Liberty selama Revolusi Amerika dianggap sebagai teroris oleh Inggris.⁶ Di sini, pemaknaan tentang terorisme lebih bernuansa politis dan ideologis.

Konsep terorisme secara politik tidak mudah untuk dikenali karakteristiknya. Tidak ada definisi tentang terorisme, tetapi sudah biasa disebut oleh kalangan ilmuwan sosial. Terorisme adalah tindakan teror yang dilakukannya berulang sebagai bentuk aksi kejahatan oleh individu, semi agen rahasia, group atau juga oleh negara. Mereka biasa melakukan target sasaran korban secara khusus (tokoh atau figur tertentu) dan juga secara acak (random). Bahasa-narasi-yang digunakan teroris atau kelompok teroris biasanya dengan bahasa ancaman, teror, intimidasi, propaganda, permintaan tertentu, dll. (Schmid & Jongman : 1988).

Para pakar hingga saat ini, belum ada titik temu di antara mereka tentang terorisme sebagai terminologi definitif yang tanpa bias. Terorisme sangat sulit untuk didefinisikan secara fenomenologis karena perspektifnya yang beragam dan historikanya yang berkembang. Apakah Anders Behring Breivik yang berafiliasi dengan partai ultra kanan di Norwegia, pelaku pengeboman di kota Oslo dan pembantaian puluhan pemuda di pulau Oetoya 22 Juli 2011 silam disebut sebagai

⁵ . De Valve, Michael J. Terrorism, Salem Press, 2023

⁶ . Ibid.

teroris?⁷ Apakah seorang pemuda di Palestina yang melawan tentara Israel menuntut hak-hak tempat tinggal mereka di wilayah Palestina misalnya disebut seorang teroris? Dan banyak lagi contoh yang bisa membiaskan terminologi terorisme, tergantung dari perspektif masing-masing pihak.

Terorisme pada umumnya, dipahami merujuk pada tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil dalam mengejar tujuan politik atau ideologis.⁸ Meskipun deklarasi, resolusi, dan perjanjian “sektoral” universal telah mengartikulasikan beberapa kondisi dan elemen inti yang berbeda, belum ada definisi standar mengenai terminologi terorisme secara sempurna.

Organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya untuk menetapkan definisi legal-yuridis mengenai ‘terorisme’ yang dapat diterima secara umum karena definisi ini dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam melawan terorisme.

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia bertolak dari dengan tidak adanya definisi terorisme yang disepakati secara internasional, meminta Negara-negara untuk dipandu oleh elemen-elemen kunci aksi terorisme yang diatur dalam resolusi Dewan Keamanan 1566 (2004) dan definisi model yang dikembangkan oleh Dewan Keamanan Khusus.⁹ Tetapi terorisme secara umum, didefinisikan sebagai penggunaan paksa, atau ancaman, kekerasan untuk meneror komunitas atau masyarakat untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, atau sosial, (De Valve, Michael J. 2023).¹⁰

Olivier Faure berpandangan bahwa konsep terorisme yang bermuatan politis dan

emosional memang tidak mudah untuk dicirikan. Tidak ada definisi terorisme yang diterima secara universal tetapi hanya definisi aksi yang banyak digunakan oleh para ilmuwan sosial: Terorisme adalah cara aksi kekerasan yang membangkitkan kecemasan, yang digunakan oleh individu (semi) klandestin, kelompok, atau aktor negara, untuk alasan kriminal, atau politik, di mana—berbeda dengan pembunuhan—target langsung kekerasan bukanlah target utama.¹¹

Pola gerakan dan aksinya, yang memuat tipologi terorisme yang dapat berakibat dikenali beberapa tipe dan jenis organisasi, gerakan, aksi, tindakan dan aktivitasnya, mendasari bahwa misalnya : 1) terorisme revolusioner (revolutioner terrorism) dilakukan kelompok tertentu dalam rangka menghilangkan sistem politik dan membangunnya dengan sistem baru seperti Red Brigade di Italia, Faksi Red Army di Jerman, ETA-Basque di Spanyol, ISIS di Irak dan Syria. 2) terorisme subrevolusioner, dilakukan bukan untuk menghilangkan sistem politik yang sudah ada dalam struktur, tetapi ingin memodifikasinya dengan model baru seperti group NCT di Afrika Selatan yang anti apatheid. 3) State Sponsored terrorism, Dimana kelompok atau group digunakan oleh negara untuk menentang pemerintahan sipil, menentang pemerintahan, menentang pemerintah asing atau kelompok, seperti kelompok mujahidin di Afghanistan melawan Uni Soviet, kelompok-kelompok radikal seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah di Libanon untuk menentang zionisme.¹²

Pengenalan akan tipologi tersebut, setidaknya meminimalisir pemakaian terorisme secara

⁷ . Sejumlah media Barat, utamanya jaringan British Broad Casting (BBC) secara konsisten menyebutnya sebagai “killer, murder”, bukan teroris walaupun secara ideologis, Breiviks melakukan teror dengan bom dan pembantaian sadis terhadap 69 pemuda organisasi sayap partai buruh di Norwegia, 22 Juli 2011. Selain itu, ia berafiliasi dengan neo Nazi dan menjadi pendukung partai ultra kanan di Norwegia.

⁸ .

⁹ . Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism, Office of

the United Nations High Commissioner for Human Rights.

¹⁰ . De Valve, Michael J. Terrorism, Salem Press, 2023

¹¹ . Guy Olivier Faure,

¹² . Types of Terrorism, Britanica.com (Terrorism - Political, Religious, Cyber | Britannica).

sporadis yang berimplikasi secara serampangan pula.

Michael Stohl, Richaed Burchil dan Scott Englund (2017) mempertanyakan tentang definisi terorisme. Bahkan Stohl memberi judul dalam bab kedua bukunya "Construction of Terrorism: An Interdisciplinary Approach to Reseach and Policy" dengan mengatakan "Can terrorism be defined?".

Stohl menganggap bahwa, terorisme bukan tidak dapat diberi batasan yang pasti dan baku, tetapi terlalu banyak definisi dan berlebihan. sehingga para ahli, politisi maupun masyarakat awam belum mampu mencapai kesepakatan mengenai definisi yang benar dari banyaknya definisi yang beredar.¹³

Konsekuensi lanjutan dari wacana mengenai definisi terorisme tersebut di atas, khususnya pasca perang dingin, merefleksi akan fundamentalisme Islam dan terorisme yang dikonstruksi sebagai agenda politik untuk kepentingan hegemoni ideologi maupun geopolitik dalam konteks Islam versus paradigma barat.¹⁴

2.2. Implikasi Terorisme

Pemaknaan aksentuatif tentang terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan akibat konflik teologis dalam lingkup benturan antar peradaban, kerap menimbulkan ekses dan dampak stigmatik serta diskriminatif terhadap kelompok – penganut agama tertentu-khususnya muslim.

Terorisme secara fenomenal, berdampak langsung terhadap ekonomi dan politik, termasuk di Eropa sebagai salah satu target Gerakan dan aksi terorisme. Terorisme dalam pandangan Emma Disley (2028), bukan hanya menyebabkan

hilangnya nyawa dan cacat para korbannya, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, dimana dunia usaha, kota, dan negara mengalami kerugian luar biasa mencapai miliaran dollar setelah terjadinya.

Terorisme berdasarkan penelitian yang dilakukan Disley dan timnya, memiliki hubungan langsung secara negatif dengan pertumbuhan ekonomi di Eropa. 28 negara-negara anggota Uni Eropa dalam rentang waktu antara tahun 2004 dan 2016, kehilangan sekitar €180 miliar PDB karena serangan teroris.¹⁵

Terorisme di sisi lain, juga berdampak nyata secara sosiologis bagi negara-negara Arab-muslim yang kerap dianggap sebagai penyemai terorisme. Bagi umat muslim, dampak terorisme bukan hanya ekonomi dan politik, tetapi juga psikososial, dimana muncul stigmatisasi negatif dan diskriminasi sosiologis terhadap umat muslim di berbagai belahan bumi.

2.2.1. Diskriminasi Sosiologis :

Umat muslim Pasca serangan 11 September 2001, menjadi sasaran prasangka dan diskriminasi, khususnya di wilayah Amerika Utara dan Eropa (Pew Global Attitudes Project, 2008).

Jejak pendapat yang dilakukan Pew Reseach Centre/PRC dan dipalaporkan (September/9/2009) dapat menjadi dasar, bahwa setelah delapan tahun berlalu pasca terjadinya serangan 9/11/2001, orang Amerika melihat Muslim di AS menghadapi lebih banyak diskriminasi di AS daripada kelompok agama besar lainnya. Hampir enam dari sepuluh orang dewasa (58%) mengatakan

¹³ . Michael Stohl, Richaed Burchil dan Scott Englund, *Constructions of Terrorism: An Interdisciplinary Approach to Research and Policy*, hal.11-20, University of California Press, 2017.

¹⁴ . Mengenai ancaman fundamentalisme Islam dan bahanya, lihat : Leon T. Hardar, *The "Green Peril": Creating the Islamic*

Fundamentalist Threat, Cato Institute Analys No.177, August 27, 1992.

¹⁵ . Emmas Disley, *The cost of terrorism in Europe*, Rand Europe, 6 June, 2018.

bahwa Muslim mengalami banyak diskriminasi, jauh lebih banyak daripada hal yang sama tentang orang Yahudi, Kristen evangelis, ateis, atau Mormon.¹⁶

Fakta diskriminasi tersebut berdasarkan prasangka dan persepsi korelatif antara Islam dan terorisme. Artinya, faktor penting yang mempengaruhi diskriminasi tersebut bahwa umat Islam dianggap mendukung ancaman aksi-aksi teror yang dilakukan para teroris. Hal ini juga berlaku di negara-negara Eropa Barat terhadap para imigran muslim yang berada di sana.¹⁷

Beberapa laporan menunjukkan bahwa prasangka dan diskriminasi terhadap Muslim cukup meluas dan telah meningkat di Eropa Barat dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir (Pew Global Attitudes Project, 2008; Leibold, Kühnel, & Heitmeyer, 2006; Kaplan, 2006; Zick & Küpper, 2007).

Sejumlah negara di Eropa yang menjadi tempat suka para imigran muslim seperti Perancis, Jerman, Belanda yang memiliki sikap akan terorisme dan pelakunya memerlukan ekstra hati-hati untuk melakukan labelisasi “teroris” kepada komunitas muslim dalam satu kotak yang sama.

Alexander Ritzman menegaskan bahwa Eropa harus cerdas dan menghindari terjebak dalam tujuan akhir terorisme: memaksa Eropa untuk meminggirkan komunistas muslimnya.

Rutzman memandang, justru Eropa seharusnya memberdayakan umat muslim yang menentang terorisme, terutama yang ingin bekeja di komunitas mereka melawan

mereka yang menyebarkan paham versi radikal.¹⁸

2.2.2. Stigmatisasi Teologis :

Kekeliruan memahami makna terorisme dan konteksnya, dengan aksentuase yang lebih ekstrem untuk melawan suatu kelompok karena perbedaan teologi dan ideologi, disadari atau tidak telah memberikan label stigmatik yang keliru bagi kelompok tertentu, khususnya umat muslim.

Stigmatisasi Islam dan umatnya sebagai pelaku teror dalam setiap aksi terorisme, juga telah melahirkan aksi-aksi yang tidak kalah dengan tindakan teror psikhis, teologis, dan ideologis.

Pemuatan karikatur -satire- oleh Harian Jyllands-Posten¹⁹ di Denmark, Tabloid Charlie Hebdo²⁰ di Perancis dan pemutaran film “Innocence of muslims” yang dibuat di Amerika Serikat merupakan serangkaian aksi akibat stigmatisasi tersebut.

Mereka telah menanamkan stigma bahwa terorisme adalah penjelmaan dari kesalahpahaman jihad yang banyak tertuang dalam Al-Qurán dan Hadis Nabi, sehingga Nabi Muhammad dalam satire Charlie Hebdo digambarkan sebagai inspirator teroris. Setiap ada ledakan bom atau peristiwa serangan bersenjata, umat Islam langsung menjadi target tuduhan karena Islam dianggap mengajarkan jihad kepada umatnya, sehingga kata jihad menjadi momok yang menakutkan. Padahal, kata jihad dalam Al-Qurán memiliki banyak dimensi makna dan spektrum nuansa yang berbeda dengan terorisme. Terorisme bukanlah lahir dari nilai dan ajaran Islam, tetapi lahir dari konflik kepentingan dengan

16. Muslims Widely Seen As Facing Discrimination, | Pew Research Center/
<https://www.pewresearch.org/religion/2009/09/09/muslims-widely-seen-as-facing-discrimination>, Septembere 9, 2009.

17. Ibid.

18. Claire Stam, Julija Simić, Louise Rozès Moscovenko, Zeljko Trkanjec and Zoran Radosavljevic | EURACTIV Network

Terrorism and Muslim communities: Europe's 'right' battle – Euractiv

19. Surat Kabar Denmark memantik kontroversi setelah memuat 12 kartun Nabi Muhammad pada tanggal 30 September 2005, sehingga menimbulkan protes dan kemarahan sebagian umat islam di seluruh dunia.

20. Charlie Hebdo, mingguan satire Prancis juga memuat karikatur Nabi Muhammad, sehingga menimbulkan kontroversi serta protes umat Islam.

berbagai motifnya; ekonomi, politik, dan ideologi.

Pencarian terminologi terorisme secara yuridis untuk menggadili para pelaku teror terus berlanjut, Pearce yang menulis tentang "The Political Terrorist", Pearce (1977) mengklaim bahwa "perilaku teroris politik dapat menunjukkan beberapa bukti psikopati, paranoia, atau kekosongan kejiwaan lainnya."

Dia beralasan bahwa "Individu ini mungkin seorang psikopat yang agresif, yang telah mendukung suatu tujuan tertentu karena penyebab ekstremis dapat memberikan titik fokus eksternal untuk semua hal yang salah dalam hidupnya." Dalam sebuah studi tentang tipe kepribadian teroris, Johnson dan Feldman (1992) berpendapat bahwa "Dalam arti tertentu, banyak teroris dapat dipandang sebagai orang dengan kepribadian marginal yang ditarik ke dalam kelompok karena kekurangan diri mereka sendiri. Pandangan Pearce ini memberi titik perhatian pada aspek psikologis, bahwa teroris dipengaruhi oleh faktor psikologisnya, bukan teologisnya.

Terdapat berbagai macam perspektif bahwa seseorang atau kelompok yang melawan kelompok lain karena menuntut hak-hak dan kepentingan masing-masing dinyatakan sebagai teroris. Seorang pelaku teror bisa saja dikatakan sebagai "teroris" dari satu perspektif, tetapi dalam perspektif yang lain dikatakan sebagai pejuang hak-hak kemanusiaan.

Terorisme bukanlah fenomena baru, istilah itu muncul sejak revolusi Prancis ketika kelompok tertentu hendak memaksakan kekuatan baru melalui aksi teror. Bahkan, dalam praktiknya lebih dari itu, dimana tindakan teror sudah digunakan sejak zaman alkitab-Sicari (manusia belati), Zelot, yaitu sempalan sekelompok Yahudi yang menebarkan teror terhadap para

kolaborator penduduk Romawi sekitar tahun 70 M.²¹

Selanjutnya, pada pertengahan abad ke 19, pendekatan teror menjadi alat bagi kelompok-kelompok anarkis di Rusia dalam memperjuangkan perlawanan terhadap Tsar (penguasa), perlawanan kelompok Republikan di Irlandia, kelompok Yahudi di Timur Tengah, dan juga faksi dan kelompok di Palestina melakukan tindakan teror dalam rangka memenuhi tujuan dan kepentingan politik dan agama.²²

Pendapat Olivier menunjukkan bahwa, pada abad ke 21, terorisme semakin marak digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan karena dinilai sebagai cara yang sangat potensial dalam memenuhi keinginan mereka dengan sarana yang sederhana.

Narasi-narasi yang digunakan teroris atau kelompok teroris biasanya dengan bahasa ancaman, teror, intimidasi, propaganda, permintaan tertentu, dll. (Schmid & Jongman : 1988). Bagaimanana terorisme beroperasi?

Terorisme selalu menyebar dan berkembang seperti tanpa kontrol dan kendali negara, karena secara teoritis negara tidak boleh mengakui tindakan teror atau teroris. Oleh karenanya, negara tidak bernegosiasi langsung dengan teroris, karena bernegosiasi dengan kelompok teroris berarti memberi pengakuan de facto atas kelompok teroris.

Globalisasi membuat aksi-aksi teroris tampak semakin menguntungkan, karena jangkauan mereka semakin luas –transnasional-sebagai basis operasi. Batas wilayah tidak lagi menjadi kendala, karena ada teknologi yang bisa memudahkan aksi teror dilakukan. Apakah terorisme dan jaringannya dibiarkan hingga memisahkan simpul-simpul antar peradaban dunia?

²¹ . Guy Olivier Faure, *Terrorism, Negotiation at The Edge of The Abys*, Routledge, London, 2010

²² . Ibid..

2.3 Formula Resolusi

2.3.1. Konstruksi Habermas

Sebagai bentuk tanggung jawab intelektualitasnya sebagai seorang Filsuf Giovanna Borradori, ²³ melalui karyanya mencoba memberikan pemahaman baru tentang terorisme sebagai refleksi filosofis atas aksi teror (terorisme) pasca peristiwa 11/9/2001.

Giovanna melakukan wawancara dengan seorang Filsuf Jurgen Habermas²⁴ dan Jaques Derrida²⁵ dalam rangka mendalami fenomena terorisme dalam perspektif filsuf dan bagaimana filsafat merespons situasi tersebut.

Giovanna Borradori Pada bulan-bulan setelah 11 September 2001, memimpin serangkaian wawancara di Manhattan New York antara dua filsuf Eropa terkenal, yaitu; Jürgen Habermas dan Jacques Derrida, menanyakan mereka tentang arti dan makna terorisme pada peristiwa 11 September. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah buku berjudul "Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida" yang diterbitkan pada tahun (2003).

Giovanna yang mengalami peristiwa tersebut karena tinggal di Manhattan, New York meyakini bahwa peristiwa (terorisme) 11 September 2001 memerlukan tanggapan Filsuf untuk memberi tanggapan secara filosofis melalui mewawancarai dengan dua pemikir dan Filsuf paling berpengaruh pada masa itu yaitu Jurgen Habermas dan Jacques Derrida.

Kehidupan dan karya-karya Habermas sangat dipengaruhi oleh peristiwa traumatis pada masa mudanya di Jerman. Teori Tindakan Komunikatifnya (1981) menunjukkan keterikatannya pada isu-isu otonomi dan

partisipasi dalam praktik komunikasi sehari-hari. Seperti yang dijelaskan Borradori dengan jelas: " bahwa kita mempelajari siapa kita sebagai agen otonom dari hubungan dasar kita dengan orang lain. Yang paling mendasar di antara hubungan ini adalah tindakan berkomunikasi melalui bahasa".

Teori Tindakan Komunikasi Jurgen Habermas merupakan titik pijak dialog antar agama, dan bertujuan menyajikan kondisi, situasi, dan prasyarat bagi dialog antar agama yang ideal. Pluralitas agama yang menjadi ciri bangsa Indonesia dan era globalisasi ini menjadikan berbagai penganut agama semakin intensif untuk bertemu, berkomunikasi, dan berdialog.²⁶

Penelusuran terhadap intelektualitas Jurgen Habermas tentang terorisme, menunjukkan bahwa Jurgen Habermas merupakan Filsuf generasi kedua dari madzhab Frankfurt yang mengkaji tentang teori kritis komunikasi.

Teorinya berawal dari pendahulunya yang menyatakan bahwa dalam mempelajari manusia itu sama dengan mempelajari alam yang pasti dan mudah ditebak. Padahal sifat manusia dinamis tidak bisa ditebak apalagi dijadikan obyek.

Habermas berawal dari kondisi tersebut, mencoba menawarkan teorinya, agar supaya manusia dapat berkomunikasi dengan baik ketika ia ingin memutuskan sesuatu hal dengan cara berdiskusi dan berkomunikasi. Implikasi teori kritis dalam komunikasi dalam kajian keislaman ini sangat membantu umat muslim khususnya ketika seseorang ingin berdialog lintas budaya, agama, dan negara.

Dengan berkomunikasi akan menimbulkan sikap saling memahami, toleran yang sangat

²³ . Giovanna Borradori adalah profesor filsafat di Vassar College di New York; dia percaya pada "wawancara ilmiah" sebagai bentuk penting dan bahwa filsafat memiliki kontribusi yang tak ternilai untuk memahami masalah politik kontemporer.

²⁴ . Jürgen Habermas seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman. Ia lahir di sebuah kota yaitu Dusseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni 1929.

²⁶ . Jo Priastana, Teori tindakan komunikasi Jurgen Habermas sebagai titik pijak dialog antar agama,

tinggi, tidak saling menghakimi serta tidak menyalahkan antara satu dengan yang lain.

Habermas dalam perspektif ini, mempromosikan model "demokrasi permusyawaratan", atas dasar partisipasi masyarakat sipil dan konsensus antara warga negara secara rasional, sehingga terjadi dialog.

Metodologi filosofis "rekonstruksi" Habermas adalah membangun kembali melalui komunikasi agar sesuatu menjadi mungkin dan efektif. Konflik kepentingan (ekonomi-politik-ideologi-teologi) yang terjadi dalam masyarakat memungkinkan untuk dievaluasi melalui komunikasi dan dialog. Dialog merupakan cara paling efektif dalam menyelesaikan konflik.²⁷

Habermas dalam dialog tentang terorisme ini, tampak jauh lebih terbuka - tidak konservatif - dibandingkan dengan karya-karyanya yang lain, meskipun fokusnya tetap pada kemungkinan komunikasi dan pemahaman (dialogis) mengingat meningkatnya ancaman serangan teroris terhadap kebijakan AS saat ini. Bagi Habermas, membangun komunikasi dan dialog antar peradaban (negara-bangsa) bukan benturan antar peradaban sebagaimana disinggung Huntington, adalah keniscayaan untuk menghindai aksi-aksi teror selanjutnya.

Habermas menyikapi adanya teror dengan upaya pengenalan diri kita sebagai pelaku otonom, kemudian membangun relasi-relasi melalui tindakan komunikasi dan bahasa dalam konteks pemahaman resiprokal.²⁸ Maka, di dalam penyelesaian konflik kepentingan tersebut komunikasi dan dialog menjadi alternatif resolusi dalam ranah antar institusi, sosial keagamaan, kebudayaan, peradaban dan politik baik nasional, regional maupun internasional.

Dekonstruksi Derrida

²⁷ . Dialogue and Conflict Resolution. Potential and Limits..., Pernille Rieker and Henrik Thune, ISBN: 9781472438836 Authors: Pernille Rieker, Henrik Thune./ Published by Ashgate Publishing Limited Ashgate Publishing 2015.

Sementara itu, dalam melihat fenomena serangan teroris sebagaimana yang terjadi pada 11/9/2001, Derrida seorang filsuf Perancis dipengaruhi oleh trauma sejarah: kolonialisme di Aljazair, koloni Perancis pada waktu itu (1930-an). Karyanya berasal dari sekolah-aliran dekonstruksi.

Pendekatan Jacques Derrida sebenarnya bertentangan dengan pendekatan Habermas. Derrida fokus pada bahasa dan dekonstruksi yang menunjukkan banyak lapisan makna bekerja dalam bahasa. Dengan mendekonstruksi karya-karya para sarjana terdahulu, Derrida berusaha menunjukkan bahwa bahasa terus mengalami pergeseran. Derrida, dalam dialog ini, lebih dari sebelumnya "dekonstruksionis" dalam argumentasinya dan sepenuhnya menyadari konteks di mana serangan 11 September 2001 terjadi, dalam konteks perang atau tindakan terror.

Pandangan Giovanna menunjukkan bahwa, sebuah dekonstruksi radikal terdapat perbedaan antara perang dan terorisme, serta antara berbagai jenis terorisme (seperti nasional dan internasional), membuat sangat sulit untuk memahami politik dalam arti strategis.

Derrida dalam kerangka menanggapi pernyataan tersebut dan menyikapi serangan teror 11/9/2001, mencoba menguraikan tentang akhir dari "Perang Dingin" yang menyisakan hanya satu kubu. Dengan kapastian makna terorisme dalam rangka ini menunjukkan akibat bahwa, negara-negara yang mengklaim kedaulatan, berhadapan dengan organisasi anonim dan non-negara, kekuatan bersenjata.

Kekuatan ini menurut Derrida tanpa senjata dan tanpa ledakan, tanpa serangan apa pun secara langsung, memanfaatkan teknologi komputer yang sangat merusak, teknologi

²⁸ . Giovanna Borradori, *Philosophy in a time of Terror : Dialogues With Jurgen Habermas and Jaques Derrida*, Chicago Press, 2003

yang mampu melakukan operasi yang sebenarnya tidak memiliki nama (baik perang maupun terorisme). Di sini, tidak lagi dilakukan atas nama negara-bangsa, sehingga sulit untuk didefinisikan (ada penyebab teologis, penyebab etnis, penyebab sosial ekonomi, ideologis, dan sebagainya).

Logika autoimun seperti yang menjadi ciri khas pandangan Jacques Derrida, 'bahwa perilaku aneh di mana makhluk hidup, dalam mode semi-bunuh diri, "itu sendiri" bekerja untuk menghancurkan perlingkungannya sendiri, untuk mengimmunisasi dirinya terhadap kekebalannya sendiri' (Borradori, 2003: 94).

Pandangan Derrida memperlihatkan bahwa, agama, demokrasi, terorisme, dan respons terkini terhadap trauma terorisme dapat dipahami dengan logika (autoimun). Respons terhadap terorisme bersifat 'autoimun' dan meningkatkan trauma terorisme serta mempertaruhkan nilai-nilai demokrasi.²⁹

Secara implisit, bahwa ketika Derrida mengaitkan situasi serangan teror di New York itu dengan pasca perang dingin (cold war), maka dimensi terorisme itu adalah politis dan ideologis, bukan teologis.

Kesimpulan

Perdebatan tentang definisi terorisme masih sulit untuk mencapai kata sepakat, padahal definisi tersebut peting bagi penyaring jenis tindakan dan kelompok tertentu untuk dapat dimasukkan atau tidaknya dalam kategori terorisme.

Schmid dalam *The Routledge Handbook of Terrorisme Research* mencatat beberapa hal yang menyebabkan kesulitan mendefinisikan terorisme, antara lain: Pertama, terorisme merupakan konsep yang berbeda dalam perspektif politik, ilmu sosial, hukum, dan pandangan masyarakat umum, terminologi terorisme itu sendiri telah melewati berbagai

perubahan/perkembangan makna sejak lebih 200 tahun term itu dipakai.

Dalam perspektif Olivier, terorisme bukan fenomena baru, tetapi fenomena klasik yang terjadi di berbagai tempat, kelompok agama, dan kelompok politik tertentu. Dalam konteks ini, perlu ada pemaparan historis berdasarkan fakta-fakta empiris bahwa tindakan terors-terorisme-itu sudah lama ada-sejak abad ke 19 M. yang kemudian berkembang dalam bentuknya yang berbeda-beda sesuai kepentingan, motif dan tujuan para pelaku teror tersebut; agama, politik atau ekonomi.

Fundamentalisme, radikalisme, dan bahkan terorisme bukanlah monopoli muslim, tetapi juga terjadi di lingkungan penganut agama Yahudi dan Kristen. Hanya saja porsi pemberitaan media tentang radikalisme dan terorisme lebih banyak pada kasus-kasus yang diduga dilakukan kelompok muslim, lebih-lebih lagi pasca serangan teror 11 September 2001. Dalam poin ini, jelas bahwa "perang" melawan terorisme merupakan jargon yang dikonstruksi untuk kepentingan politik.

Menghindari terjadinya aksi-aksi yang berkelanjutan dan saling balas, perlu ada upaya pemahaman akademis dan kesepahaman yang bersifat dialogis, terutama antar tokoh agama dan elit politik melalui komunikasi dan dialog secara berkesinambungan.

²⁹ . Marguerite La Caze, *Terrorism and trauma: Negotiating Derridean 'autoimmunity'*/Sage Journals, Volume, 37, Issued 5, June, 2011

IV. Daftar Pustaka/Referensi

1. Pernille Rieker and Henrik Thune, Dialogue and Conflict Resolution. Potential and Limits., ISBN: 9781472438836,/ Published by Ashgate Publishing Limited , 2015.
2. A.H.,Hendropriyono, Terorisme : Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, Kompas, 2009.
3. Gionavva Borradori, - Philosophy In A Time of Terror - Filsafat Dalam Masa Teror-, Penerjemah, Alfons Taryadi, Kompas, 2005.
- De Valve, Michael J. Terrorism, Salem Press, 2023
4. Lasse Thomassen, De/Reconstructing Terrorism Johns Hopkins University Press, Volume, 7 Issue 4, 2005
5. Pernille Rieker and Henrik Thune, Dialogue and Conflict Resolution. Potential and Limits., ISBN: 9781472438836, Published by Ashgate Publishing Limited Ashgate Publishing 2015.
6. Guy Olivier Faure. Guy Olivier Faure, Terrorism, Negotiation at The Edge of The Abbyss,
7. Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
8. Leon T. Hardar, The "Green Peril": Creating the Islamic Fundamentalist Threat, Cato Institute Analys No.177, August 27, 1992.
9. Marguerite La Caze, Terrorism and trauma: Negotiating Derridean 'autoimmunity'/Sage Journals, Volume, 37, Issued 5, June, 2011.
10. Michael Stohl, Richaed Burchil dan Scott Englund, Constructions of Terrorism: An Interdisciplinary Approach to Research and Policy, hal.11-20, University of California Press, 2017.
11. *Philosophy in a time of Terror : Dialogues With Jurgen Habermas and Jaqqes Derrida*, Chicago Press, 2003
12. .The Routledge Handbook of Terrorism Research, *Edited Alex Schmid* : 2011.
13. Jurnal Imu Al Quran dan Tafsir, Volume 3 Nomor 1 Juni 2020
14. <https://www.pewresearch.org/politics/2009/09/09/muslims-widely-seen-as-facing-discrimination>.
15. De Valve, Michael J.Terrorism, Salem Press, 2023.
16. <https://www.pewresearch.org/politics/2009/09/09/muslims-widely-seen-as-facing-discrimination/>.
17. Proving Discrimination in the Counter-Terrorism Context in Europe | OHRH (ox.ac.uk).
18. Opinion | WISHFUL THINKING ABOUT ISLAMIC FUNDAMENTALISM - The Washington Post.